



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 28/Kpts./KU.010/A/01/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas serta pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa belum adanya Kepala Satuan Kerja definitif lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, telah diusulkan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dari Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sesuai surat Nomor B-05/KU.010/H.1/01/2026 tanggal 2 Januari 2026;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Lembaran Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3602/Kpts/KU.410/11/2010 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Untuk Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 485/KPTS/KU.010/A/8/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 325.1/KPTS/KU.010/A/04/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 485/KPTS/KU.010/A/8/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN.
- KESATU : Menunjuk, Nama NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Terhitung Mulai Tanggal sebagaimana daftar terlampir sebagai Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Badan Perakitan Modernisasi Pertanian.
- KEDUA : Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam kekuasaannya serta menyelesaikan seluruh administrasi dan pelaporan Keuangan.
- KETIGA : Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berakhir masa tugasnya apabila telah ditetapkan Kepala Satuan Kerja yang definitif.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 10 Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2026

a.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,

SUWANDI
NIP 196703231992031003

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pertanian;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat; dan
7. Kepala Satuan Kerja berkenaan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 28/Kpts./KU.010/A/01/2026

TANGGAL : 14 Januari 2026

TENTANG USULAN PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
SATUAN KERJA LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

NO	KODE SATKER	NAMA INSTANSI/SATUAN KERJA	PLT. KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN/TMT
1	2	3	4
1	567392	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH	Dr. Rachman Jaya, S.Pi., M.Si 19740305 200003 1 001 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh
2	567428	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA	Dr. Siti Maryam Harahap, SP, MP 19700412 199903 2 001 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara
3	567460	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU	Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si 19740402 199903 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau
4	320091	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU	Ahmad Tohir Harahap, SP 19791121 201101 1 007 Penata Tingkat I (III/d) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau

NO	KODE SATKER	NAMA INSTANSI/SATUAN KERJA	PLT. KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN/TMT
1	2	3	4
5	634001	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI	Firdaus, SP. M.SI 19710805 200604 1 002 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi
6	633996	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU	Dr. Shannora Yuliasari, STP, MP 19740731 200312 2 001 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi
7	567449	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA BARAT	Dr. Salwati, S.P., M.Si 19730307 199803 2 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat
8	567495	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN	Dr. Rustam, S.P., M.Si. 19690607 199903 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan
9	450840	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si 19720330 200701 1 001 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung
10	567517	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG	Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D 19741222 199903 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung

NO	KODE SATKER	NAMA INSTANSI/SATUAN KERJA	PLT. KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN/TMT
1	2	3	4
11	450831	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN	Dr. Suharyanto, S.P., M.P. 19710613 199803 1 002 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten
12	633961	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN DKI JAKARTA	Dr. Sri Sasmita Dahlan, S.P., M.Si. 19830319 200501 2 001 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian DKI Jakarta
13	567296	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT	Dr. Rustan Massinai, S.T.P., M.Sc. 19690802 200212 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat
14	567318	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH	Dr. Soeharsono, S.Pt., M.Si 19710927 199803 1 002 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah
15	633975	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN DI YOGYAKARTA	Dr. Rudi Hartono, SP., MP 19730430 199903 1 001 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian DI Yogyakarta
16	567364	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR	Dr. Ismatul Hidayah, S.P, M.P 19730611 200604 2 017 Pembina Tingkat I (IV/B) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur

NO	KODE SATKER	NAMA INSTANSI/SATUAN KERJA	PLT. KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN/TMT
1	2	3	4
17	633982	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI	Dr. Drh. I Made Rai Yasa, MP. 19720929 199903 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bali
18	634040	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT	Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si 19671114 199803 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat
19	567783	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR	Dr. Abdul Wahab, SP, MP 19700122 200701 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur
20	634015	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN	Dr. Ahmad Subhan, S.Pt, M.Sc 19700424 199403 1 003 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan
21	567627	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR	Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt, M.P. 19690227 199103 1 004 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur
22	567570	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH	Franciscus Xaverius Lilik Tri Mulyantara, S.TP., M.Si., Ph.D. 19681219 199903 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah

NO	KODE SATKER	NAMA INSTANSI/SATUAN KERJA	PLT. KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN/TMT
1	2	3	4
23	567563	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT	Anjar Suprpto, STP, M.P. 19720912 200501 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat
24	634022	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI UTARA	Ir. Agus Salim, M.P. 19670817 199603 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara
25	450856	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO	Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si 19730915 200604 2 018 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo
26	567673	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGAH	Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi. M.Si 19691125 199903 2 001 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
27	500957	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT	Repelita Kallo, S.T.P., M.Si. 19680610 200501 2 002 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat
28	634036	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN	Ir. Yusuf, M.Si 19671027 200312 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan

NO	KODE SATKER	NAMA INSTANSI/SATUAN KERJA	PLT. KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN/TMT
1	2	3	4
29	567702	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA	Dr. Budi Darma Putra, SE., M.M. 19820520 200910 1 001 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara
30	567737	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU	Dr. Gunawan, S.TP,M.Si 19761216 200501 1 002 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku
31	450862	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU UTARA	Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si. 19680722 199403 1 003 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara
32	567830	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA	Dr. Aser Rouw, SP, M.Si 19720316 199903 1 002 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua
33	450871	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT	Dr. Yong Farmanta, S.P, M.Si 19790116 200312 1 002 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat
34	-	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN UTARA	Muhamad Rizal, S.P., M.Sc. NIP 198003162008011008 Penata Tingkat I (III/d) Plt. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Utara

NO	KODE SATKER	NAMA INSTANSI/SATUAN KERJA	PLT. KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN/TMT
1	2	3	4
35	-	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA SELATAN	Dr. Ir. Martina Sri Lestari, MP 19670317 199403 2 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan
36	-	LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA PEGUNUNGAN	Edion Ayakeding, S.ST., M.Si. 19790116 200312 1 002 Penata (III/c) Plt. Kepala Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Pegunungan
37	-	LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TENGAH	Merlin Konelia Rumbarar, SP., M.Sc. 19850223 201101 2 017 Penata Tingkat I (III/d) Plt. Kepala Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah
38	-	LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT DAYA	Galih Wahyu Hidayat, SP., MP 19810825 201503 1 001 Penata (III/c) Plt. Kepala Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Daya

a.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,

SUWANDI
NIP 196703231992031003